

**PENGARUH CAPAIAN PROGRAM KPU *GOES TO CAMPUS*
TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA
PADA PEMILU 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

AHMAD SYAIFUL ZUHRI

NPM 2216041020



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PENGARUH CAPAIAN PROGRAM KPU *GOES TO CAMPUS* TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA PADA PEMILU 2024 DI PROVINSI LAMPUNG

OLEH

AHMAD SYAIFUL ZUHRI

Program KPU *Goes to Campus* merupakan strategi edukasi kepemiluan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih muda melalui lingkungan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Kuesioner disebarkan kepada 119 responden dan 115 data dinyatakan layak dianalisis setelah proses penyaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program berada pada kategori baik dan partisipasi pemilih muda termasuk dalam kategori cukup tinggi. Uji regresi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,201 yang berarti Program KPU *Goes to Campus* berpengaruh sebesar 20,1% terhadap partisipasi pemilih muda, sedangkan 79,9% dipengaruhi faktor lain. Nilai *t* hitung sebesar 5,334 dengan sig. $0,000 < 0,05$ menunjukkan pengaruh signifikan variabel capaian program terhadap partisipasi pemilih muda. Koefisien regresi sebesar 0,449 menunjukkan bahwa setiap peningkatan capaian program sebesar satu satuan akan meningkatkan partisipasi pemilih muda sebesar 0,449 satuan. Temuan ini menegaskan bahwa program mampu meningkatkan literasi politik, kesadaran pemilu, serta mendorong partisipasi mahasiswa dalam proses demokrasi, namun capaian masih perlu diperluas melalui inovasi dan keberlanjutan program agar dampak yang dihasilkan lebih optimal dan merata..

Kata Kunci: Capaian Program, KPU *Goes to Campus*, Partisipasi, Pemilih Muda, Mahasiswa

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE ACHIEVEMENT OF THE KPU GOES TO CAMPUS PROGRAM ON THE INCREASE OF YOUNG VOTERS' PARTICIPATION IN THE 2024 ELECTION IN LAMPUNG PROVINCE

By

AHMAD SYAIFUL ZUHRI

The KPU Goes to Campus Program is an electoral education strategy aimed at increasing awareness and participation among young voters through the academic environment. This study aims to analyze the influence of the achievement of the KPU Goes to Campus Program on the increase of young voters' participation in the 2024 General Election in Lampung Province. The research employed a quantitative approach using simple linear regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 119 respondents, of which 115 responses were declared valid and eligible for analysis after data screening. The results indicate that the achievement of the program is categorized as good, while young voters' participation is classified as relatively high. The regression analysis shows an R Square value of 0.201, indicating that the KPU Goes to Campus Program contributes 20.1% to the variation in young voters' participation, while the remaining 79.9% is influenced by other factors outside this study. The calculated t-value of 5.334 with a significance level of $0.000 < 0.05$ confirms that the achievement of the program has a positive and significant influence on young voters' participation. The regression coefficient value of 0.449 indicates that every one-unit increase in program achievement leads to a 0.449-unit increase in young voters' participation. These findings suggest that the KPU Goes to Campus Program contributes to improving electoral literacy, increasing awareness of elections, and encouraging student participation in democratic processes. However, the program's achievement remains limited and requires further expansion through innovation and sustainability to ensure broader and more optimal impacts.

Keywords: Program Achievement, KPU Goes to Campus, Participation, Young Voters, Students

**PENGARUH CAPAIAN PROGRAM KPU *GOES TO CAMPUS* TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA PADA PEMILU 2024 DI
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Ahmad Syaiful Zuhri

Skripsi

Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PENGARUH CAPAIAN PROGRAM KPU
GOES TO CAMPUS TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH
MUDA PADA PEMILU 2024 DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Syaiful Zuhri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216041020**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

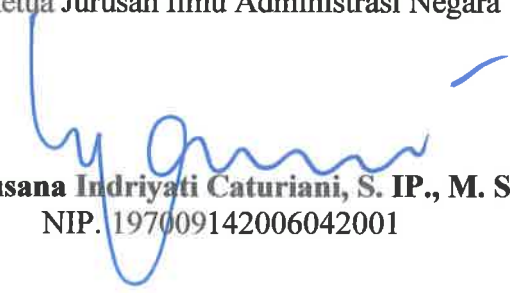
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA.
NIP. 198212112006041001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.
NIP. 197009142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA.



Penguji : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Syaiful Zuhri
NPM 2216041020

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Syaiful Zuhri lahir di Uman Agung, Lampung Tengah, Pada tanggal 01 April 2004, Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sutrisno dan Siti Lestari. Penulis memiliki 1 adik bernama Ahmad Rafiq Yusuf Marhandika. Jenjang pendidikan penulis dimulai di TK Bratasena Adiwarna, Tulang Bawang, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 01 Bratasena Adiwarna, Tulang Bawang dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP S Al-Kautsar Bandar Lampung, dan diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA S Al-Kautsar Bandar Lampung dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi pada jenjang strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN, selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi internal kampus, Penulis pernah menjabat sebagai kepala bidang Hubungan Masyarakat pada HMJ Administrasi Negara Unila periode 2025 Kabinet Mesin Revolusi, penulis juga diamanahi sebagai ketua angkatan dari mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2022 (AMPATRA), penulis juga ikut serta aktif dalam kegiatan lain seperti menjadi pimpinan sidang 1 musyawarah besar Himagara Periode 2023, ketua pelaksana pelatihan teknik sidang Himagara 2024 serta koordinator *partnership* acara tingkat nasional pada kegiatan Himagara *Fantastic Event* 2023 dan 2024.

MOTTO

fa inna ma'al-'usri yusrā, inna ma'al-'usri yusrā

” Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

Kuatkanlah dirimu atas pertanyaan yang memburu
tentang masa depan, pernikahan, pendidikan, pekerjaan
keimanan.

(Daniel Baskara, Hindia)

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu
tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan
cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikann
itu tidak diberikan sama sekali

(Tan Malaka, Madilog)

”THANK YOURSELF FOR SAVING YOU”

(Ahmad Syaiful Zuhri)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT

Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu Tercinta,

*Yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan,
pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah untukku.*

Keluarga besar dan sahabat,

yang selalu memberikan doa serta dukungannya.

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, serta doa

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Capaian Program KPU *Goes to Campus* Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.P.A. selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas segala bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang begitu padat, Bapak tetap meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi, dan memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Dosen Penguji Utama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, dan masukan berharga yang telah Ibu Ita berikan selama proses ujian dan penyempurnaan skripsi ini. Setiap arahan dan evaluasi yang Ibu sampaikan tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas karya ilmiah ini, tetapi juga memperluas wawasan serta membentuk pola pikir kritis penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ibu Ita beserta keluarga.
3. Ibu Dr. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik selaku pembimbing akademik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang telah Ibu berikan selama masa studi. Dukungan Ibu sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Semoga

Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan, serta terus menjadi pribadi yang menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.

4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, mba Wulan dan mba Uki, terima kasih mba atas bantuan, pelayanan, dan dukungan administratif yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebaikan hati mba Wulan dan mba Uki sangat membantu memperlancar berbagai proses akademik penulis. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Bapak Azriando Cahya Negara, S.H., M.H. serta seluruh pegawai di Bidanganya), terima kasih sudah menerima saya dengan baik dan mengajarkan banyak ilmu serta membantu dalam memperoleh data saat penyusunan skripsi hingga selesai. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu di balas dengan lebih baik oleh Allah SWT.
7. Seluruh responden penelitian, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu, memberikan jawaban, serta informasi yang jujur dan objektif dalam pengisian kuesioner penelitian ini. Partisipasi dan kontribusi yang responden berikan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Secara khusus kepada kedua orang tua penulis, Ayah. dan Ibu. yang sangat saya sayangi dan menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Terimakasih untuk segala upaya mendidik penulis dengan tanpa banyak kata, meskipun masih banyak hal yang belum tercapai dari diri penulis, meskipun banyak hal-hal yang menyakiti selama ini.

Terimakasih atas kehebatan kalian dalam memberikan pendidikan layak yang telah kalian usahakan untuk penulis. Semoga Allah SWT. Membalas setiap ketulusan hati dan kebaikan kalian dengan limpahan rezeki, kesehatan, serta kebahagiaan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup.

9. Salsabila Fitri, terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab hidup penulis. Semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan takdir yang baik dalam kehidupan kelak.
10. Keluarga besar Jl. Pahlawan no. 63. Terimakasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, menyenangkan, serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu dari kita punya. Suka dan duka telah dilalui bersama dalam proses pendewasaan diri sejak penulis masih menempuh pendidikan di bangku SMP dan SMA, Semoga kelak kita bisa sukses bersama.
11. Bang Rizky Armanda Putra, S.A.N. dan Bang M. Akbar Saputra, S.A.N. Yang selalu memberikan dukungan dan motivasi ketika penulis berada di bangku perkuliahan hingga akhirnya bisa menyusul abang abang untuk lulus, Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga. Terimakasih untuk segalanya dan untuk selalu bisa di andalkan, menyemangati, dan selalu membantu dalam menjalani skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Ampatra 2022. Khususnya Naufal, Vito, Kerby, Tama, Dzahabi, Kadek Dio, Dzarya, Zidan, Rafli dan lain-lain Terimakasih untuk momen kebersamaan selama kurang lebih 4 empat tahun ini, semoga kita semua dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan dan dapat bermanfaat bagi banyak orang

13. Terimakasih untuk keluarga besar Kekaisaran Negara, Christian Abimayu, Nabel Arfi, Shalman Dian, Zuhdi Amin, dan lain-lain , Terimakasih atas momen kebersamaanya yang begitu berkesan dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi tanpa terkecuali.
14. Terimakasih kepada salah satu Band Indonesia Hindia yang menemani dan memberikan semangat untuk diri ini melalui lirik-lirik ditulis dalam setiap lagu dalam album Menari dengan bayangan dan Lagipula hidup akan berakhir.
15. Terimakasih kepada Liam Gallagher dan Noel Gallagher (OASIS) sang maestro atas Album (*What's the story*) *Morning Glory*. yang juga mengisi hari-hari penulis dalam mengerjakan bait demi bait dalam skripsi sebagai bentuk pelepasan lelah dari kejenuhan prosesnya.
16. Dan, semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang jika nama nya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungan, bimbingan, masukan, dan arahnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu dan Saudara semua dengan pahala yang berlimpah.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026

Penulis

Ahmad Syaiful Zuhri
NPM. 2216041020

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Kajian Teori dan Konsep	13
2.2.1 Evaluasi Kebijakan Publik	13
2.2.2 Konsep Program KPU <i>Goes to Campus</i>	20
2.2.3 Konsep Partisipasi pemilih Muda.....	25
2.3 Kajian Konseptual.....	28
2.4 Kerangka Berpikir.....	33
2.5 Hipotesis Penelitian.....	34
III. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	35

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Alat dan Objek Penelitian	39
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	40
3.4.1 Populasi.....	40
3.4.2 Sampel	41
3.5 Variabel Penelitian.....	44
3.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel Penelitian	45
3.6.1 Definisi Konseptual.....	45
3.6.2 Definisi Operasional.....	46
3.7 Sumber Data	49
3.7.1 Data Primer	49
3.7.1 Data Sekunder	50
3.8 Teknik Pengumpulan Data	50
3.9 Metode Pengujian Data	51
3.9.1 Uji Validitas	51
3.9.2 Uji Reliabilitas	52
3.10 Teknik Analisis Data.....	53
3.10.1 Uji Asumsi Klasik.....	53
3.10.1.1 Uji normalitas.....	53
3.10.1.2 Uji Linearitas.....	53
3.10.1.3 Uji Heteroskedastisitas	54
3.11 Analisis Regresi Linear Sederhana	54
3.11.1 Uji Hipotesis.....	55
3.11.2 Uji T (Parsial).....	55
3.11.3 Uji F (Simultan)	56
3.11.4 Analisis Koefisien Determinasi (R ²).....	57
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	58
4.2 Gambaran Umum Program KPU <i>Goes to Campus</i>	61
4.3 Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	66
4.4 Tugas Pokok, Kewenangan dan Struktur KPU Provinsi Lampung	67
4.5 Hasil Penelitian	72
4.5.1 Karakteristik Responden	72
4.5.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden	80

4.5.2.1 Variabel Capaian Program KPU <i>Goes to Campus</i> (X)	81
4.5.2.2 Variabel Partisipasi Pemilih Muda (Y).....	83
4.5.3 Hasil Prasyarat Instrumen	84
4.5.3.1 Uji Validitas	85
4.5.3.2 Uji Reliabilitas	86
4.5.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	88
4.5.4.1 Uji Normalitas.....	88
4.5.4.2 Uji Linearitas	89
4.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas	91
4.5.5 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana	93
4.5.6 Hasil Uji Hipotesis	96
4.5.6.3 Hasil Uji t (Parsial).....	96
4.5.6.3 Hasil Uji F (Simultan)	98
4.5.6.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	100
4.5.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	102
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Pemilih Umum di Provinsi Lampung 2024	2
2. Kerangka Berpikir	33
3. Dokumentasi KPU <i>Goes to Campus</i> di Universitas Lampung	61
4. Dokumentasi KPU <i>Goes to Campus</i> di Universitas Tulang Bawang	62
5. Dokumentasi KPU <i>Goes to Campus</i> di Fakultas MIPA.....	65
6. Struktur Organisasi	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Komposisi Pemilih Tetap Provinsi Lampung.....	3
2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024.....	4
3. Penelitian Terdahulu.....	9
4. Waktu Penelitian.....	38
5. Distribusi Populasi.....	41
6. Distribusi Sampel	43
7. Operasionalisasi Variabel	47
8. Pengukuran Skala Likert	51
9. Kriteria Koefisien Korelasi.....	57
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
11. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	74
12. Karakteristik Responden Berdasarkan Fakultas	76
13. Karakteristik Responden Berdasarkan Semester	77
14. Karakteristik Responden Berdasarkan Keikutsertaan dalam Program KPU Goes to Campus.....	79
15. Kriteria Interval <i>Mean</i> Skala Likert.....	81
16. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Capaian Program KPU Goes to Campus (X)	82
17. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Pemilih Muda (Y)	83
18. Hasil Uji Validitas Variabel Capaian Program KPU Goes to Campus (X)	85
19. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Pemilih Muda (Y).....	86
20. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	87
21. Hasil Uji Normalitas	88
22. Hasil Uji Linearitas.....	90
23. Hasil Uji Heteroskedastisitas	92
24. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana.....	94

25. Hasil Uji t (Parsial)	97
26. Hasil Uji F (Simultan)	99
27. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	101

I. PENDAHULUAN

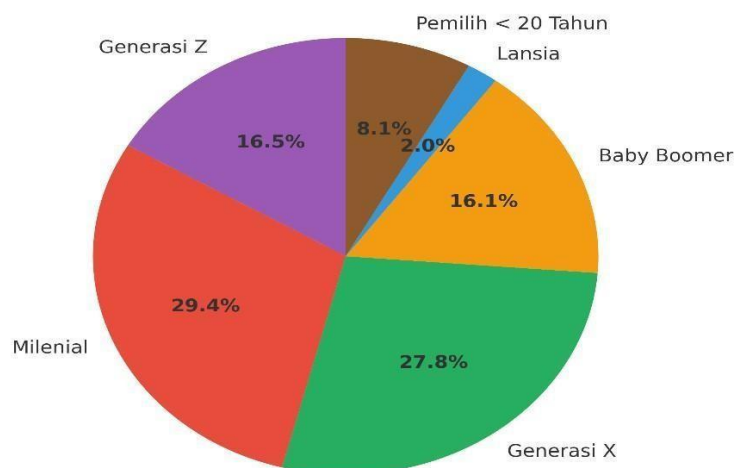
1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi *modern* yang menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui Pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah pemerintahan serta menjadi wujud nyata dari asas kedaulatan rakyat. Lebih dari itu, Pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur konstitusional yang berlangsung setiap lima tahun, tetapi juga sebagai tolak ukur kualitas demokrasi suatu negara, di mana legitimasi hasilnya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat.

Sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya bertanggung jawab memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Salah satu mandat utama KPU sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih yang bertujuan membangun kesadaran politik, memperkuat literasi demokrasi, serta mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam setiap tahapan Pemilu. Upaya peningkatan partisipasi tersebut secara strategis diarahkan kepada kelompok pemilih muda, khususnya mahasiswa, yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi Indonesia.

Kualitas demokrasi suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh terlaksananya Pemilu secara rutin, melainkan juga ditopang oleh sejauh mana partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Partisipasi politik, khususnya dalam bentuk penggunaan hak pilih, merupakan prasyarat legitimasi hukum maupun politik pemerintahan. Menurut Huntington dan Nelson (1976), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Pandangan ini diperkuat Milbrath dan Goel (1977), yang menekankan bahwa partisipasi politik mencakup aktivitas konvensional, seperti memberikan suara dalam Pemilu, maupun non-konvensional, seperti diskusi publik dan advokasi politik. Tingginya partisipasi menandakan kesadaran politik yang sehat, sementara rendahnya partisipasi mencerminkan *apatisme* yang dapat melemahkan legitimasi demokrasi.

**Jumlah Pemilih Umum di Provinsi Lampung Tahun 2024
(Berdasarkan Generasi)**



Gambar 1. Jumlah Pemilih Umum di Provinsi Lampung 2024

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Pada konteks Pemilu 2024, pemilih muda khususnya generasi milenial dan generasi Z memiliki peran strategis karena secara jumlah mendominasi daftar pemilih tetap (DPT). Berdasarkan data KPU Provinsi Lampung, pemilih berusia 17–30 tahun mencapai hampir 50% dari total DPT. Jumlah ini memberikan pengaruh signifikan terhadap

hasil Pemilu, tetapi berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelompok muda masih memiliki tingkat partisipasi yang fluktuatif dan cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya

Berdasarkan gambar diatas, terkait diagram jumlah Pemilih umum di Provinsi Lampung bahwa generasi milenial (32,02%) dan generasi Z (17,96%) mendominasi daftar pemilih, diikuti generasi X (30,28%), sedangkan kelompok lansia hanya berkontribusi 2,22%. Data ini menegaskan bahwa generasi muda memiliki potensi elektoral yang sangat besar dan menjadi target utama program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU. Dominasi jumlah tersebut menjadikan pemilih muda sebagai faktor penentu keberhasilan Pemilu, karena tingkat partisipasi mereka dapat secara signifikan memengaruhi legitimasi hasil pemilihan. Namun, potensi kuantitatif ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan kualitas maupun konsistensi partisipasi nyata di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banyak di antara pemilih muda yang masih menunjukkan sikap apatis, kurang memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi, atau hanya berpartisipasi secara simbolik tanpa kesadaran politik yang mendalam. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi sosialisasi yang lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan karakteristik generasi muda agar potensi elektoral yang besar tersebut benar-benar dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi yang aktif dan bermakna. Berdasarkan data KPU Provinsi Lampung, komposisi pemilih milenial dan *Gen Z* menempati hampir setengah dari jumlah pemilih tetap. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Komposisi Pemilih Tetap Provinsi Lampung

No	Kelompok Usia	Jumlah & Persentase dari DPT Lampung
1	Milenial (25–39 tahun)	2.094.127 jiwa (32,02%)
2	Gen Z (17–24 tahun)	1.174.188 jiwa (17,96%)
3	Gabungan Milenial + Gen Z	3.268.315 jiwa (49,71%)
4	Pemilih Pemula (<20 tahun)	576.128 jiwa (8,81%)

Sumber: KPU Provinsi Lampung, (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa generasi muda (milenial dan *Gen Z*) berjumlah hampir 50% dari DPT Lampung, sehingga suara mereka sangat menentukan arah hasil Pemilu 2024. Selain dari sisi jumlah, penting juga melihat bagaimana tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 di Lampung. Secara keseluruhan, partisipasi pemilih tercatat cukup tinggi, namun masih menyisakan tantangan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024

No	Indikator	Jumlah / Persentase
1	Total DPT Lampung	6.539.128 jiwa
2	Pemilih yang menggunakan hak pilih	5.206.308 orang
3	Golput (yang tidak memilih)	1.332.820 orang
4	Tingkat partisipasi keseluruhan	80,64%

Sumber: KPU Provinsi Lampung, (2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Lampung mencapai 80,64%, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak

5.206.308 orang dari total DPT 6.539.128 jiwa. Meskipun angka ini cukup tinggi, masih terdapat sekitar 1,33 juta orang (19,36%) yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fakta ini memperlihatkan adanya tantangan nyata dalam menjaga konsistensi partisipasi masyarakat, termasuk dari kalangan pemilih muda yang jumlahnya sangat signifikan.

Sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya partisipasi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan program pendidikan pemilih yang lebih dekat dengan segmen mahasiswa, salah satunya melalui Program *KPU Goes to Campus*. Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman politik dan menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menggunakan hak pilih. Melalui kegiatan seperti seminar, kuliah umum, simulasi pemungutan suara, dan diskusi interaktif, KPU berupaya membangun kesadaran politik mahasiswa agar lebih partisipatif.

Menurut Budifebrianto dan Delliana (2020), pendekatan yang

mengkombinasikan komunikasi langsung dengan media *digital* terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan pemilih muda. Hal ini diperkuat oleh Syaifuddin (2021), yang menyatakan bahwa pendidikan pemilih di ruang-ruang interaksi generasi muda seperti kampus dan komunitas mampu meningkatkan literasi politik sekaligus kesadaran berdemokrasi.

Penelitian-penelitian terdahulu juga menekankan perlunya sinergi antara metode tatap muka dan digital dalam strategi pendidikan pemilih. Rahmawati dan Nasution (2022), menunjukkan bahwa forum diskusi publik dan tatap muka lebih efektif membangun kepercayaan publik, sementara Hidayat dkk. (2023), menekankan bahwa kolaborasi dengan tokoh lokal dapat meningkatkan legitimasi program. Akmal dkk. (2024) melalui studi kampanye #TemanPemilih di *Instagram* menyatakan bahwa gaya komunikasi kreatif yang sesuai tren generasi muda mampu meningkatkan *engagement*, tetapi tetap memerlukan sentuhan tatap muka untuk membangun kedekatan personal. Sementara itu, Alifa dkk. (2024), menegaskan pentingnya konten kreatif interaktif untuk meningkatkan literasi politik, dan Umma & Ahmad (2025), menambahkan bahwa media sosial efektif dalam memperluas transparansi informasi publik, namun pengaruh optimal baru tercapai jika diintegrasikan dengan interaksi langsung.

Namun, penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda di Provinsi Lampung masih terbatas. Mayoritas studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada kampanye digital atau strategi komunikasi politik secara umum, sehingga belum banyak yang membahas secara empiris bagaimana program tatap muka di lingkungan perguruan tinggi memengaruhi literasi politik, kesadaran, perilaku memilih mahasiswa dan terhadap partisipasi pemilih muda.

Namun demikian, meskipun program ini telah dijalankan di berbagai daerah, masih ditemukan perbedaan hasil antara tujuan dan capaian di

lapangan. Hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi capaian program secara menyeluruh. Di sinilah relevansi teori Evaluasi Kebijakan Dunn (2018), menjadi penting. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan publik dapat diukur melalui lima kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), dan responsivitas (*responsiveness*). Evaluasi menggunakan teori ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana Program KPU *Goes to Campus* mampu mencapai tujuan, menggunakan sumber daya secara efisien, memberikan manfaat yang merata, serta menanggapi kebutuhan mahasiswa sebagai pemilih muda.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena capaian Program KPU *Goes to Campus* tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi politik generasi muda, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Apabila kelompok muda dengan jumlah signifikan ini gagal dioptimalkan partisipasinya, maka kualitas Pemilu dapat terancam. Oleh sebab itu, penelitian ini penting secara akademis untuk memperkaya literatur administrasi publik dan komunikasi politik, serta secara praktis bagi KPU dalam merumuskan strategi sosialisasi yang tepat sasaran, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan generasi muda di Provinsi Lampung pasca Pemilu 2024.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung?
2. Berapa tingkat pengaruh capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda

pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

2. Untuk menganalisis besarnya tingkat pengaruh capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh sejumlah manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam memperkuat kajian mengenai evaluasi kebijakan publik dan capaian program pemerintah. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga publik yang tidak hanya menjalankan fungsi regulatif dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berperan sebagai agen pendidikan politik yang melaksanakan program berbasis kebijakan publik. Melalui penerapan teori Evaluasi Kebijakan Dunn (2018), penelitian ini memberikan landasan akademik mengenai pentingnya penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas program publik sebagai instrumen peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai evaluasi kebijakan publik dalam konteks pendidikan politik pemilih muda di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPU Provinsi Lampung dalam meningkatkan capaian pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus* sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih muda. Melalui hasil evaluasi berdasarkan teori Dunn (2018),

KPU dapat mengidentifikasi aspek-aspek program yang telah berjalan efektif maupun yang perlu diperbaiki agar kegiatan serupa di masa mendatang lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan akademisi dalam merancang strategi komunikasi politik dan pendidikan pemilih yang mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan turut berkontribusi terhadap upaya penguatan demokrasi dan peningkatan kualitas kebijakan publik di bidang pemilihan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam tinjauan pustaka berperan untuk menyusun alur yang sistematis dalam pengembangan konsep dan teori. Untuk memperkuat penelitian ini, penulis menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan atau tolok ukur. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus/Variabel	Hasil Temuan Utama
1	Sari (2020)	<i>Evaluasi Program Sosialisasi Pemilu oleh KPU Kota Yogyakarta</i>	Efektivitas & Responsivitas program sosialisasi	Efektivitas program berpengaruh terhadap peningkatan literasi politik peserta
2	Kusuma (2021)	<i>Efektivitas Program KPU Goes to School terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Kota Malang</i>	Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan	Efektivitas dan kecukupan paling berpengaruh terhadap partisipasi politik siswa
3	Rahman & Indriastuti (2022)	<i>Peran KPU dalam Meningkatkan Literasi Politik Generasi Milenial melalui KPU Goes to Campus di Jawa Barat</i>	Pelaksanaan program KPU & dampak terhadap kesadaran politik	Program efektif meningkatkan literasi politik namun perlu peningkatan pemerataan kegiatan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus / Variabel	Hasil Temuan
4	Lestari (2020)	<i>Evaluasi Kebijakan Pendidikan Politik dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda di Kota Palembang</i>	Efektivitas, Responsivitas	Efektivitas dan responsivitas kebijakan menentukan keberhasilan pendidikan politik
5	Pratama (2019)	<i>Hubungan Efektivitas Sosialisasi Pemilu Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa di Lampung</i>	Efektivitas Sosialisasi dan Partisipasi Politik	Efektivitas sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang tersaji dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti capaian pelaksanaan program sosialisasi politik oleh KPU sebagai faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih muda. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menggunakan pendekatan evaluatif terhadap kebijakan publik, meskipun fokus dan lokasinya berbeda. Temuan dari masing-masing penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020), di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa efektivitas dan responsivitas program sosialisasi pemilu berpengaruh terhadap peningkatan literasi politik peserta. Temuan ini menegaskan pentingnya kemampuan lembaga pelaksana, dalam hal ini KPU, untuk menyesuaikan bentuk sosialisasi dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sasaran. Hal ini sejalan dengan dua indikator utama dalam teori Evaluasi Kebijakan Dunn (2018), yaitu *efektivitas* (pencapaian tujuan kebijakan) dan *responsivitas* (daya tanggap terhadap kebutuhan publik).

Selanjutnya, penelitian Kusuma (2021), tentang *KPU Goes to School* di Kota Malang menunjukkan bahwa efektivitas dan kecukupan merupakan aspek paling berpengaruh terhadap partisipasi politik siswa. Artinya, capaian program pendidikan politik tidak hanya bergantung pada tercapainya tujuan, tetapi juga pada sejauh mana kegiatan tersebut cukup memadai untuk menjawab masalah rendahnya partisipasi politik. Temuan ini secara langsung memperkuat dimensi *adequacy* (kecukupan) dalam teori Dunn, sekaligus memperlihatkan kemiripan konteks dengan penelitian ini, karena sama-sama menilai efektivitas program KPU yang bersifat edukatif.

Sementara itu, penelitian Rahman dan Indriastuti (2022), mengenai *KPU Goes to Campus* di Jawa Barat menegaskan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa, namun pemerataan pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan secara lebih luas di berbagai perguruan tinggi. Kesimpulan tersebut berhubungan langsung dengan dua kriteria evaluasi Dunn (2018), yaitu efektivitas dan pemerataan (*equity*), yang menilai sejauh mana kebijakan publik menghasilkan dampak yang adil dan merata di antara kelompok sasaran.

Temuan Lestari (2020), tentang *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Politik di Kota Palembang* juga menunjukkan bahwa efektivitas dan responsivitas kebijakan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan program pendidikan politik. Hasil ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus peka terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian, penelitian Lestari semakin menguatkan argumentasi teoritis bahwa efektivitas dan responsivitas adalah ukuran penting dalam mengevaluasi capaian program publik.

Selain itu, penelitian Pratama (2019), yang meneliti *Hubungan Efektivitas Sosialisasi Pemilu terhadap Tingkat Partisipasi Politik*

Mahasiswa di Lampung menemukan adanya hubungan yang signifikan antara efektivitas sosialisasi dengan peningkatan partisipasi mahasiswa. Penelitian ini menjadi sangat relevan karena memiliki kesamaan konteks wilayah (Provinsi Lampung) dan variabel penelitian dengan penelitian yang sedang dilakukan. Temuan Pratama memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara efektif dapat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, yang sejalan dengan teori Partisipasi Politik Milbrath & Goel (1977), mengenai pengaruh stimulus politik terhadap perilaku pemilih.

Secara keseluruhan, kelima penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran bahwa efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas merupakan dimensi penting yang menentukan capaian pelaksanaan kebijakan publik di bidang pendidikan politik. Namun, dapat dicatat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengintegrasikan seluruh indikator evaluasi kebijakan Dunn (2018) dalam menganalisis capaian program. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji Program KPU *Goes to Campus* di Provinsi Lampung masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam tiga aspek utama:

1. Pendekatan teori: menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Dunn (2018), dengan lima indikator utama (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas).
2. Konteks empiris: fokus pada pelaksanaan capaian Program KPU *Goes to Campus* di Provinsi Lampung yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu administrasi publik melalui penerapan teori evaluasi kebijakan, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi KPU.

2.2 Kajian Teori dan Konsep

2.2.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap paling penting dalam siklus kebijakan publik, karena berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan atau program yang dijalankan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi berperan sebagai mekanisme pengawasan dan pembelajaran, baik bagi pemerintah sebagai pelaksana maupun bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Tanpa adanya evaluasi, pembuat kebijakan tidak akan memiliki dasar ilmiah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, maupun dampak kebijakan publik yang telah diterapkan. Oleh sebab itu, evaluasi bukan sekadar alat ukur hasil, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye (2013), evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai hasil dan dampak suatu kebijakan guna menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar berhasil memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dye menekankan pentingnya evaluasi berbasis bukti (*evidence-based policy*), karena kebijakan publik sejatinya bertujuan untuk menyelesaikan masalah konkret, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif. Evaluasi kebijakan menurut Dye dilakukan dengan mengukur sejauh mana perubahan sosial yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan, serta menilai apakah kebijakan tersebut membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pandangan Dye (2013), evaluasi kebijakan memiliki beberapa kriteria penting yang menjadi ukuran capaiannya, antara lain:

1. Kesesuaian tujuan kebijakan dengan permasalahan publik yang dihadapi. Evaluasi harus memastikan bahwa kebijakan dirancang untuk menjawab masalah nyata masyarakat.

2. Pencapaian hasil (*outcome*) kebijakan secara empiris. Hasil kebijakan harus dapat diukur dan dibandingkan dengan tujuan awal.
3. Dampak sosial dan ekonomi kebijakan terhadap masyarakat. Kebijakan publik dikatakan berhasil apabila memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Relevansi kebijakan dengan kondisi sosial-politik. Setiap kebijakan harus sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik tempat kebijakan itu diterapkan.

Selanjutnya, James E. Anderson (2014), memandang evaluasi kebijakan publik sebagai proses penilaian yang tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan. Anderson menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari masukan (*inputs*), proses pelaksanaan (*throughputs*), keluaran (*outputs*), hingga hasil akhir (*outcomes*). Ia berpendapat bahwa kegagalan kebijakan seringkali bukan karena perumusan tujuannya, melainkan karena lemahnya proses implementasi di lapangan.

Menurut Anderson (2014), evaluasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa dimensi pokok, yaitu:

1. Evaluasi *Input*, yaitu penilaian terhadap sumber daya (biaya, tenaga, waktu, dan informasi) yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Evaluasi Proses, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan apakah berjalan sesuai rencana, peraturan, dan koordinasi antar lembaga.
3. Evaluasi *Output*, yaitu pengukuran terhadap hasil langsung dari kegiatan atau program kebijakan.
4. Evaluasi *Outcome*, yaitu penilaian terhadap dampak jangka panjang kebijakan terhadap masyarakat, baik secara sosial,

ekonomi, maupun politik.

Anderson menempatkan evaluasi kebijakan sebagai alat untuk menilai capaian administratif dan sejauh mana kebijakan memengaruhi perilaku masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa capaian kebijakan tidak hanya diukur dari hasil yang terlihat, tetapi juga dari proses pelaksanaan yang efisien dan transparan.

Sementara itu, Dunn (2018), mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai proses menghasilkan informasi tentang nilai dan manfaat dari kebijakan publik melalui analisis terhadap kriteria rasional tertentu. Dunn memandang evaluasi sebagai bagian dari analisis kebijakan publik yang bertujuan untuk membantu pembuat keputusan menentukan apakah kebijakan perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dihentikan. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif, karena harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kepuasan publik. Dunn (2018), memperkenalkan enam kriteria utama evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas (*Effectiveness*) sejauh mana hasil kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi (*Efficiency*) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.
3. Kecukupan (*Adequacy*) sejauh mana hasil kebijakan cukup untuk memecahkan masalah yang menjadi fokus kebijakan.
4. Pemerataan (*Equity*) sejauh mana manfaat kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat.
5. Responsivitas (*Responsiveness*) sejauh mana kebijakan tanggap terhadap kebutuhan, aspirasi, dan kepuasan masyarakat.
6. Ketepatan (*Appropriateness*) sejauh mana kebijakan sesuai dengan nilai sosial, moral yang berlaku di masyarakat.

Namun, dalam konteks penelitian ini, hanya digunakan lima indikator utama (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas)

karena indikator ketepatan bersifat normatif dan sulit diukur secara kuantitatif. Dunn menilai bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya efektif secara hasil, tetapi juga efisien dalam sumber daya, cukup dalam menjawab masalah publik, adil dalam distribusi manfaat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Subarsono (2015), evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana kebijakan publik telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi memiliki dua fungsi utama: fungsi akuntabilitas dan fungsi pembelajaran (*learning process*). Fungsi akuntabilitas menegaskan bahwa hasil evaluasi menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan kebijakan, sedangkan fungsi pembelajaran menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Subarsono (2015), mengemukakan empat indikator utama dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Efektivitas, untuk mengukur sejauh mana kebijakan atau program mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Efisiensi, untuk menilai rasionalitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Kecukupan, untuk menilai sejauh mana hasil kebijakan mampu memecahkan masalah publik.
4. Responsivitas, untuk menilai sejauh mana kebijakan memberikan kepuasan kepada masyarakat serta menanggapi aspirasi publik.

Keempat indikator ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada sejauh mana proses pelaksanaan kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dijalankan secara efektif oleh lembaga pemerintah.

Berbeda dengan Subarsono, Riant Nugroho (2017), menekankan dimensi sosial dan keberlanjutan dalam evaluasi kebijakan. Ia berpendapat bahwa

evaluasi kebijakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya, sehingga dapat menggambarkan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Nugroho menempatkan evaluasi kebijakan tidak hanya sebagai alat ukur administratif, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial (*social learning process*) yang memastikan kebijakan publik tetap relevan dengan perubahan lingkungan.

Menurut Riant Nugroho (2017), terdapat lima kriteria utama dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Efektivitas, yaitu sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi, yaitu sejauh mana kebijakan dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.
3. Relevansi, yaitu kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan masalah masyarakat.
4. Dampak (*Impact*), yaitu perubahan sosial, ekonomi, atau politik yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan.
5. Keberlanjutan (*Sustainability*), yaitu kemampuan kebijakan untuk mempertahankan hasil dan manfaatnya dalam jangka panjang.

Nugroho menilai bahwa kebijakan publik yang baik tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, memiliki dampak positif, dan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Menurut berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik pada dasarnya bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan secara objektif dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan di masa depan. Masing-masing tokoh memberikan penekanan yang berbeda: Dye menitikberatkan pada *problem solving*; Anderson pada proses dan hasil; Dunn pada kriteria rasional yang multidimensi; Subarsono pada akuntabilitas dan pembelajaran kelembagaan; serta Nugroho pada keberlanjutan dan relevansi sosial.

Pada konteks penelitian ini, teori Dunn (2018), dipilih karena paling komprehensif dan relevan dengan pendekatan kuantitatif. Lima indikator utama Dunn efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas dapat diukur melalui persepsi responden, sehingga memungkinkan penilaian empiris terhadap capaian Program KPU *Goes to Campus*. Teori ini juga memberikan kerangka evaluasi yang multidimensi, mencakup kinerja administratif, pemerataan manfaat, serta kepuasan publik.

Melalui teori Dunn, capaian Program KPU *Goes to Campus* dapat dianalisis dari:

- (1) sejauh mana tujuan peningkatan partisipasi mahasiswa tercapai (efektivitas),
- (2) kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh (efisiensi),
- (3) kemampuan program menjawab masalah rendahnya partisipasi mahasiswa (kecukupan),
- (4) pemerataan manfaat kegiatan di berbagai kampus (pemerataan),
- (5) kemampuan KPU menanggapi aspirasi serta kebutuhan mahasiswa (responsivitas).

Sebagai hasil dari proses evaluasi kebijakan publik, konsep capaian digunakan untuk menggambarkan tingkat hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan atau program berdasarkan indikator-indikator evaluasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks evaluasi kebijakan, capaian tidak dimaknai sebagai penilaian normatif mengenai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan secara mutlak, melainkan sebagai gambaran empiris mengenai sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (2018), yang menekankan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan menghasilkan informasi faktual dan terukur mengenai kinerja kebijakan berdasarkan kriteria rasional, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Dengan demikian, diksi capaian digunakan untuk

menunjukkan hasil evaluasi kebijakan yang bersifat deskriptif, terukur, dan berbasis data empiris, sehingga lebih sesuai untuk penelitian kuantitatif. Penggunaan istilah capaian juga menghindari penilaian yang bersifat normatif dan subjektif, serta menempatkan evaluasi kebijakan sebagai alat analisis yang menjelaskan kondisi aktual pelaksanaan program berdasarkan indikator yang dapat dioperasionalkan secara ilmiah.

Lebih lanjut, penggunaan diksi capaian dalam evaluasi kebijakan publik juga mencerminkan pendekatan analisis yang berorientasi pada proses dan hasil antara (*intermediate outcomes*), bukan semata-mata pada hasil akhir (*ultimate outcomes*). Pada praktik kebijakan publik, sebuah program sering kali belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks, namun telah menghasilkan capaian-capaian tertentu yang dapat diukur dan dianalisis secara empiris. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan tidak dimaksudkan untuk memberikan label berhasil atau gagal secara dikotomis, melainkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan telah bergerak menuju tujuan yang diharapkan. Subarsono (2015), menegaskan bahwa evaluasi kebijakan berfungsi sebagai instrumen pembelajaran kebijakan (*policy learning*), yaitu untuk mengetahui bagian-bagian kebijakan yang telah mencapai target serta aspek yang masih memerlukan perbaikan. Dalam kerangka ini, capaian menjadi istilah yang lebih tepat karena menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator tertentu, tanpa mengabaikan keterbatasan dan kendala yang masih ada di lapangan.

Selain itu, diksi capaian juga relevan dengan pendekatan kuantitatif yang menuntut pengukuran berbasis data dan variabel yang dapat dioperasionalkan. Nugroho (2017), menjelaskan bahwa dalam penelitian kebijakan publik berbasis kuantitatif, penilaian kebijakan harus dirumuskan dalam bentuk variabel yang dapat diukur secara objektif melalui instrumen penelitian, seperti kuesioner atau indikator kinerja. Pada konteks ini, capaian program dipahami sebagai akumulasi skor atau nilai yang diperoleh dari pengukuran indikator evaluasi

kebijakan, bukan sebagai klaim normatif atas keberhasilan program. Dengan demikian, capaian merepresentasikan hasil evaluasi yang bersifat empiris, terukur, dan dapat diuji secara statistik, sehingga sejalan dengan tujuan penelitian kuantitatif yang menekankan hubungan antarvariabel dan pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan istilah capaian sebagai hasil dari evaluasi kebijakan, penelitian ini menempatkan evaluasi kebijakan sebagai alat analisis yang bersifat deskriptif-analitis, bukan sebagai alat legitimasi kebijakan. Artinya, capaian yang diperoleh dari Program KPU *Goes to Campus* dipahami sebagai gambaran sejauh mana program tersebut telah mencapai indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, berdasarkan persepsi dan pengalaman responden. Capaian tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa program telah sepenuhnya optimal, melainkan untuk menunjukkan tingkat hasil yang telah dicapai serta ruang perbaikan yang masih terbuka. Oleh karena itu, penggunaan diksi capaian dalam penelitian ini dinilai lebih tepat secara konseptual, metodologis, dan empiris dibandingkan dengan istilah keberhasilan, terutama dalam konteks evaluasi kebijakan publik berbasis penelitian kuantitatif.

2.2.2 Konsep Program KPU *Goes to Campus*

Program KPU *Goes to Campus* merupakan salah satu inisiatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik mahasiswa sebagai bagian dari kelompok pemilih muda. Program ini termasuk dalam implementasi fungsi pendidikan pemilih sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa KPU memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai penyelenggara teknis pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong peningkatan literasi politik masyarakat.

Secara normatif, tujuan utama dari program KPU *Goes to Campus* adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu serta memperkenalkan nilai-nilai dasar demokrasi seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab warga negara. Dalam konteks ini, KPU menjalankan peran edukatif melalui pendekatan nonformal yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program ini tidak selalu berjalan ideal. Di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Lampung, keterbatasan sumber daya, koordinasi, serta minat peserta menjadi faktor yang memengaruhi kualitas implementasi kegiatan. Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa, bukan hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari dampak pemahaman dan kesadaran politik yang terbentuk.

Dari perspektif administrasi publik, program ini dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan politik. Menurut Subarsono (2015), capaian suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari seberapa baik kebijakan tersebut dijalankan secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan itu memberikan perubahan perilaku sosial dan memperbaiki kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, KPU *Goes to Campus* bukan hanya perlu dilihat sebagai kegiatan sosialisasi formal, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang berpotensi memengaruhi kesadaran politik jangka panjang masyarakat kampus. Sementara itu, Nugroho (2017), menekankan bahwa kebijakan publik bersifat dinamis karena selalu berinteraksi dengan konteks sosial dan politik masyarakat. Dalam kasus KPU *Goes to Campus*, konteks yang dihadapi adalah perubahan perilaku politik generasi muda yang semakin terpengaruh oleh media sosial, meningkatnya sikap skeptis terhadap politik, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan kepemiluan secara langsung. Hal ini membuat pelaksanaan program di lapangan tidak jarang menghadapi tantangan, seperti rendahnya antusiasme mahasiswa, keterbatasan waktu

kegiatan, dan kurangnya integrasi antara materi yang disampaikan dengan kebutuhan aktual mahasiswa. Karena itu, penting untuk menilai bukan hanya keberadaan program, tetapi juga sejauh mana pelaksanaannya relevan dengan kondisi sosial dan karakteristik peserta.

Tujuan program ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai proses, tahapan, dan nilai-nilai Pemilu.
- (2) meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap peran mereka sebagai pemilih muda dalam sistem demokrasi.
- (3) membangun sikap rasional dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politik.
- (4) memperluas jangkauan pendidikan pemilih di lingkungan perguruan tinggi.
- (5) memperkuat hubungan kelembagaan antara KPU dan dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Tujuan-tujuan tersebut bersifat normatif dan ideal, namun pencapaiannya bergantung pada sejauh mana kegiatan dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kegiatan KPU *Goes to Campus* di lapangan umumnya dilakukan melalui kuliah umum, seminar, diskusi publik, serta simulasi pemungutan suara. Namun, efektivitas metode ini sering kali bergantung pada kualitas penyampaian narasumber, ketersediaan waktu mahasiswa, dan tingkat interaktivitas kegiatan. Di beberapa kampus, kegiatan berlangsung hanya satu kali tanpa tindak lanjut, sehingga dampak jangka panjang terhadap kesadaran politik mahasiswa sulit diukur. Menurut laporan KPU Provinsi Lampung (2024), kegiatan KPU *Goes to Campus* telah dilaksanakan di beberapa universitas negeri dan swasta, namun pemerataan dan kesinambungan program masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program telah berjalan secara formal, belum tentu hasilnya optimal dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa sebagai pemilih muda.

Pada konteks evaluasi kebijakan publik, capaian pelaksanaan program dapat dianalisis dengan teori Dunn (2018), yang mengemukakan lima kriteria utama evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.

- (1) Efektivitas (*Effectiveness*) mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai. Dalam hal ini, efektivitas KPU *Goes to Campus* tidak hanya dinilai dari jumlah peserta kegiatan, tetapi juga dari peningkatan pemahaman dan minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Jika mahasiswa hanya hadir tanpa adanya perubahan sikap atau pengetahuan, maka efektivitas program dapat dikatakan rendah.
- (2) Efisiensi (*Efficiency*) menilai perbandingan antara hasil dan sumber daya yang digunakan. Beberapa kegiatan di tingkat daerah berjalan dengan anggaran terbatas dan ketergantungan pada kerja sama kampus. Hal ini di satu sisi menunjukkan upaya efisiensi, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi kedalaman materi dan kualitas interaksi peserta.
- (3) Kecukupan (*Adequacy*) mengukur sejauh mana hasil kegiatan mampu menjawab masalah rendahnya partisipasi pemilih muda. Dalam konteks Lampung, meskipun tingkat partisipasi meningkat, belum tentu peningkatan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh kegiatan KPU *Goes to Campus*, melainkan bisa juga oleh faktor eksternal seperti meningkatnya perhatian terhadap isu politik nasional.
- (4) Pemerataan (*Equity*) berkaitan dengan sejauh mana program menjangkau seluruh kalangan mahasiswa. Laporan KPU menunjukkan bahwa kegiatan lebih banyak terpusat di universitas besar, sedangkan kampus kecil di daerah belum semuanya terlibat aktif, sehingga pemerataan masih menjadi persoalan.
- (5) Responsivitas (*Responsiveness*) menilai kemampuan KPU menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan mahasiswa. Banyak

kegiatan yang masih bersifat satu arah (ceramah) sehingga mahasiswa belum sepenuhnya terlibat dalam diskusi politik yang mendalam.

Kelima indikator tersebut menunjukkan bahwa *KPU Goes to Campus* merupakan program yang memiliki potensi besar dalam pendidikan politik, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Program ini belum dilaksanakan secara merata, belum berkelanjutan di banyak kampus, dan masih minim evaluasi pascakegiatan. BPS Provinsi Lampung (2025), juga mencatat bahwa peningkatan kesadaran politik mahasiswa hanya sekitar 6,2% dalam lima tahun terakhir angka yang menunjukkan kemajuan, tetapi belum signifikan jika dibandingkan dengan upaya dan biaya yang telah dikeluarkan.

Keterbatasan lain yang perlu dicermati adalah kurangnya adaptasi terhadap kebiasaan baru generasi muda dalam memperoleh informasi politik. Berdasarkan survei CSIS (2024), 69% pemilih muda memperoleh informasi politik dari media sosial, bukan dari kegiatan tatap muka. Namun, sebagian besar kegiatan *KPU Goes to Campus* masih berfokus pada pendekatan konvensional seperti seminar dan kuliah umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa program perlu bertransformasi agar lebih relevan dengan pola komunikasi politik generasi digital. Secara keseluruhan, Program *KPU Goes to Campus* dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik yang memiliki tujuan baik dan arah yang jelas, tetapi pelaksanaannya masih perlu penguatan dalam aspek efektivitas, pemerataan, dan kesinambungan. Teori evaluasi kebijakan Dunn (2018), digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menilai sejauh mana program telah memenuhi kriteria kebijakan publik secara rasional dan empiris. Melalui lima indikator yang dapat dioperasionalkan secara kuantitatif, teori Dunn membantu peneliti menilai capaian program tidak hanya dari pelaksanaan program, tetapi dari seberapa besar dampak partisipasi.

2.2.3 Konsep Partisipasi pemilih Muda

Partisipasi pemilih muda merupakan salah satu komponen penting dalam sistem demokrasi karena menentukan sejauh mana masyarakat, khususnya generasi muda, terlibat dalam proses pemilihan umum. Partisipasi bukan hanya persoalan hadir atau tidak hadir di tempat pemungutan suara, tetapi mencerminkan tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, pemilih muda memiliki posisi strategis karena mereka adalah kelompok yang sedang membangun identitas sosial dan pandangan terhadap negara. Namun, pada saat yang sama, kelompok ini juga paling rentan terhadap sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik.

Menurut Huntington dan Nelson (1976), partisipasi warga negara mencakup seluruh aktivitas yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi dapat berbentuk tindakan memberikan suara, menghadiri kegiatan sosialisasi, atau sekadar mencari informasi terkait calon dan kebijakan publik. Sementara itu, Milbrath dan Goel (1977), membedakan partisipasi menjadi dua bentuk utama, yakni partisipasi konvensional seperti memilih dalam Pemilu dan partisipasi non-konvensional seperti keterlibatan dalam kampanye atau diskusi publik. Meskipun teori ini dikembangkan di negara maju, konsepnya masih relevan untuk memahami perilaku pemilih muda di Indonesia, di mana aktivitas pemilihan sering kali menjadi indikator paling nyata dari partisipasi warga negara.

Lebih lanjut, Almond dan Verba (1963), dalam konsep *civic culture* menjelaskan bahwa partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat. Budaya partisipatif akan mendorong individu untuk lebih aktif menggunakan hak pilih dan mengikuti perkembangan kebijakan publik. Namun, dalam masyarakat dengan budaya politik

parokial atau subjek, partisipasi biasanya cenderung rendah karena warga merasa keputusan politik berada di luar kendali mereka. Temuan ini penting karena membantu menjelaskan mengapa sebagian besar pemilih muda di Indonesia masih menunjukkan tingkat partisipasi yang fluktuatif tidak selalu karena tidak peduli, tetapi karena kurangnya rasa memiliki terhadap sistem politik dan institusi publik.

Pada konteks Indonesia, Ramlan Surbakti (1992), mendefinisikan partisipasi pemilih sebagai keikutsertaan individu dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemerintahan. Partisipasi tersebut dapat bersifat aktif, seperti memberikan suara dan ikut mengawasi jalannya Pemilu, atau bersifat pasif, seperti hanya menerima informasi dan memahami proses kepemiluan. Dengan demikian, partisipasi pemilih muda tidak hanya diukur dari seberapa banyak mereka datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga dari sejauh mana mereka memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah pemerintahan.

Pemilih muda sendiri umumnya mencakup kelompok usia antara 17 sampai 30 tahun, sebagaimana dikategorikan oleh Badan Pusat Statistik RI (BPS, 2024). Kelompok usia ini merupakan pemilih potensial terbesar di Indonesia, dengan proporsi mencapai lebih dari 52% dari total daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024. Namun, menurut KPU RI (2024), dan beberapa hasil survei nasional seperti yang dilakukan oleh CSIS (2024), partisipasi pemilih muda tidak selalu konsisten. Banyak di antara mereka yang memiliki minat tinggi terhadap isu publik, tetapi enggan menyalurkannya dalam bentuk keikutsertaan langsung dalam Pemilu. Faktor penyebabnya beragam, antara lain minimnya pendidikan kepemiluan, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga negara, serta persepsi negatif terhadap dunia politik yang dianggap penuh kepentingan dan tidak berpihak pada generasi muda. Partisipasi pemilih muda juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses informasi, lingkungan sosial, serta pengalaman politik sebelumnya. Mahasiswa yang aktif

dalam kegiatan kampus atau organisasi cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi karena mereka terbiasa berdiskusi dan menilai isu-isu publik secara kritis. Sebaliknya, kelompok pemuda nonkampus sering kali menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah karena kurangnya akses terhadap informasi yang benar dan terbatasnya pengalaman berinteraksi dengan lembaga publik. Nugroho (2017), menegaskan bahwa perilaku pemilih muda cenderung pragmatis dan mudah berubah tergantung pada konteks sosial, isu yang berkembang, dan pengaruh media massa.

Bentuk-bentuk partisipasi pemilih muda dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan.

- (1) Partisipasi pasif, yaitu keikutsertaan dalam bentuk menerima informasi tanpa keterlibatan langsung, seperti mengikuti sosialisasi atau membaca berita Pemilu.
- (2) Partisipasi aktif terbatas, yaitu keterlibatan dalam kegiatan seperti menghadiri acara sosialisasi, simulasi pemungutan suara, atau menjadi relawan dalam kegiatan kepemiluan.
- (3) Partisipasi aktif penuh, yaitu keterlibatan secara langsung dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun pengawas. Tingkatan ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak selalu dapat diukur secara tunggal, karena bisa terjadi variasi antara kesadaran, niat, dan tindakan nyata.

Partisipasi pemilih muda masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar. Berdasarkan hasil survei KPU Provinsi Lampung (2024), meskipun tingkat partisipasi pemilih muda pada Pemilu 2024 meningkat menjadi 78,12%, angka tersebut belum mencerminkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas partisipasi. Banyak mahasiswa yang memilih hanya karena dorongan sosial atau ajakan pihak tertentu, bukan karena kesadaran rasional. Selain itu, masih ditemukan rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pra-Pemilu seperti diskusi kebijakan publik

atau pendidikan memilih. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kuantitatif belum tentu berbanding lurus dengan partisipasi yang substantif.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi memilih muda adalah proses keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pemilihan umum yang mencerminkan kesadaran, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap sistem pemerintahan. Tingkat partisipasi mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti pengetahuan, pendidikan, dan motivasi, maupun eksternal seperti lingkungan sosial, media, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi memilih muda dipahami sejauh mana mahasiswa sebagai bagian dari kelompok usia muda menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses pemilihan umum baik dalam bentuk kesadaran, kehadiran, maupun tindakan nyata untuk menggunakan hak pilih. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus* memiliki pengaruh terhadap peningkatan partisipasi memilih muda di lingkungan perguruan tinggi. Analisis ini tidak hanya menekankan jumlah partisipasi, tetapi juga menilai kualitas keterlibatan mahasiswa, termasuk pemahaman mereka terhadap makna partisipasi sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara dalam memperkuat demokrasi.

2.3 Kajian Konseptual

Konseptual berfungsi untuk menjembatani teori-teori yang telah dibahas sebelumnya dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini, terdapat dua konsep utama yang menjadi dasar analisis, yaitu konsep capaian program KPU *Goes to Campus* sebagai variabel independen (X) dan konsep partisipasi memilih muda sebagai variabel dependen (Y). Melalui kajian konseptual, kedua konsep tersebut dijelaskan secara operasional agar dapat diukur dan dihubungkan dalam konteks penelitian ini. Capaian program dalam konteks kebijakan publik

menggambarkan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Siagian (2008), capaian program adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara tepat. Subarsono (2015), menambahkan bahwa capaian suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari hasil administratifnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat sosial dan perubahan perilaku bagi masyarakat sasaran. Dengan demikian, capaian program tidak hanya diukur dari indikator formal seperti pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari hasil substantif seperti peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat terhadap tujuan kebijakan.

Pada konteks penelitian ini, capaian Program KPU *Goes to Campus* diartikan sebagai sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan pendidikan pemilih sebagaimana ditetapkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap proses kepemiluan serta mendorong mereka untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Program dapat dikatakan berhasil apabila kegiatan yang dilakukan mampu menghasilkan perubahan pengetahuan dan perilaku mahasiswa terhadap pentingnya peran mereka sebagai pemilih muda. Namun, capaian tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan kegiatan, metode penyampaian, keterlibatan peserta, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan mahasiswa.

Dunn (2018), menjelaskan bahwa capaian kebijakan publik dapat dievaluasi melalui lima dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan program tercapai sesuai perencanaan. Efisiensi mengukur perbandingan antara hasil dan sumber daya yang digunakan

dalam pelaksanaan kegiatan. Kecukupan menunjukkan sejauh mana hasil program cukup untuk menjawab masalah publik yang dihadapi. Pemerataan menilai keadilan distribusi manfaat kepada seluruh kelompok sasaran, sedangkan responsivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kelima kriteria ini menjadi dasar untuk menilai capaian Program KPU *Goes to Campus* secara komprehensif dan terukur. Penggunaan teori Dunn dianggap relevan karena menyediakan pendekatan evaluatif yang rasional dan dapat dioperasionisasikan dalam penelitian kuantitatif.

Capaian program KPU *Goes to Campus* dapat dilihat dari sejumlah aspek yang saling berkaitan. Dari segi efektivitas, capaian diukur dari kemampuan program mencapai sasaran peningkatan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya Pemilu. Dari segi efisiensi, pelaksanaan kegiatan bergantung pada kemampuan KPU mengelola sumber daya dengan optimal, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi. Dari sisi kecukupan, capaian bergantung pada sejauh mana program benar-benar mampu menjawab rendahnya partisipasi pemilih muda, bukan sekadar memenuhi target administratif. Aspek pemerataan menilai apakah program dilaksanakan secara adil di berbagai kampus, baik negeri maupun swasta, sedangkan aspek responsivitas menilai kemampuan KPU menyesuaikan kegiatan dengan karakter dan kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian, capaian program ini bersifat relatif dan bergantung pada keseimbangan antarindikator tersebut.

Sementara itu, partisipasi pemilih muda mencerminkan sejauh mana generasi muda berperan dalam proses pemilihan umum, baik dalam bentuk kesadaran, pengetahuan, maupun tindakan nyata menggunakan hak pilih. Huntington dan Nelson (1976), memaknai partisipasi sebagai aktivitas warga negara untuk memengaruhi keputusan pemerintah, sedangkan Ramlan Surbakti (1992) mendefinisikannya sebagai keterlibatan individu dalam proses politik dan pemerintahan, baik secara aktif maupun pasif. Dalam konteks kepemiluan, partisipasi pemilih muda

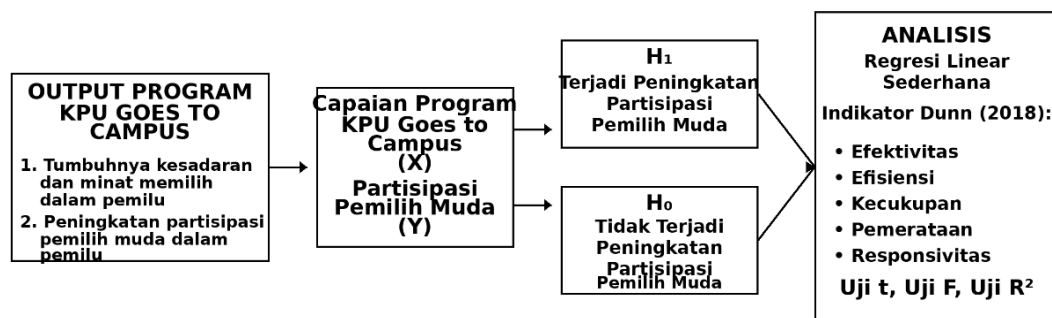
tidak hanya terbatas pada tindakan memberikan suara, tetapi juga mencakup kesadaran untuk memahami proses Pemilu dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pemilih muda menurut Badan Pusat Statistik RI (2024) adalah kelompok usia 17– 30 tahun yang secara demografis mendominasi jumlah pemilih di Indonesia. Namun, tingkat partisipasi mereka sering kali bersifat fluktuatif. Banyak di antara mereka yang memiliki akses informasi luas melalui media sosial, tetapi masih menunjukkan sikap skeptis terhadap proses pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan kepemiluan, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga publik, serta persepsi negatif terhadap penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, partisipasi pemilih muda tidak hanya dapat dipahami secara kuantitatif melalui angka kehadiran di TPS, tetapi juga secara kualitatif melalui kesadaran dan motivasi mereka untuk berpartisipasi. Milbrath dan Goel (1977), mengelompokkan partisipasi warga menjadi beberapa bentuk, mulai dari partisipasi pasif, partisipasi aktif terbatas, hingga partisipasi aktif penuh. Dalam konteks pemilih muda, bentuk partisipasi pasif dapat berupa mengikuti kegiatan sosialisasi, membaca informasi kepemiluan, atau berdiskusi ringan tentang Pemilu. Partisipasi aktif terbatas mencakup keikutsertaan dalam kegiatan seperti simulasi pemungutan suara atau kampanye pendidikan pemilih, sedangkan partisipasi aktif penuh meliputi tindakan menggunakan hak pilih atau menjadi bagian dari relawan kepemiluan. Ketiga bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemilih muda tidak bersifat tunggal, tetapi memiliki spektrum yang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kesempatan yang tersedia.

Pada penelitian ini, partisipasi pemilih muda dioperasionalkan menjadi tiga indikator utama, yaitu kesadaran, pengetahuan, dan tindakan. Kesadaran mencakup pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya menggunakan hak pilih. Pengetahuan mencerminkan sejauh mana mahasiswa memahami proses dan aturan kepemiluan, sedangkan tindakan menggambarkan perilaku nyata dalam berpartisipasi dalam

Pemilu. Ketiga indikator ini dianggap mewakili aspek kognitif, afektif, dan konatif dalam perilaku partisipasi, sebagaimana dijelaskan oleh Almond dan Verba (1963) dalam konsep *civic culture*, bahwa partisipasi yang ideal adalah partisipasi yang didasari kesadaran dan pemahaman, bukan sekadar tindakan formal. Hubungan konseptual antara capaian program dan partisipasi pemilih muda bersifat rasional dan empiris. Program pendidikan pemilih yang berhasil diyakini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya partisipasi dalam Pemilu, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka partisipasi. Sebaliknya, apabila program tidak dijalankan secara efektif dan relevan, maka dampaknya terhadap partisipasi cenderung minimal. Oleh karena itu, capaian Program KPU *Goes to Campus* memiliki potensi menjadi salah satu faktor pendorong, meskipun bukan satu-satunya, dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda. Hubungan ini yang kemudian akan diuji secara empiris dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Kerangka berpikir di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan Program KPU Goes to Campus didasarkan pada regulasi dan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih. Program ini lahir untuk menjawab permasalahan rendahnya partisipasi pemilih muda dan rendahnya literasi politik di kalangan mahasiswa. Sebagai bentuk implementasi kebijakan publik, Program KPU Goes to Campus bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi generasi muda. Hasil evaluasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana program ini berhasil meningkatkan

kesadaran politik mahasiswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu mendatang, sekaligus menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU di masa mendatang.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori serta kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

a. Hipotesis Nol (H_0):

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap Partisipasi Pemilih Muda di Provinsi Lampung.

b. Hipotesis Alternatif (H_1):

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap Partisipasi Pemilih Muda di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional (asosiatif). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengumpulan data yang bersifat numerik, sehingga hasil analisis dapat digeneralisasikan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap sesuai karena penelitian ini berusaha menguji sejauh mana efektivitas Program KPU *Goes to Campus* berhubungan dengan tingkat partisipasi pemilih muda di Provinsi Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif atau korelasional, karena penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara dua variabel utama, yaitu variabel independen (X) yaitu capaian Program KPU *Goes to Campus*, dan variabel dependen (Y) yaitu Partisipasi Pemilih Muda. Penelitian asosiatif menurut Arikunto (2014), merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah capaian pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus* yang dinilai berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan Dunn (2018) memiliki pengaruh yang signifikan dengan peningkatan partisipasi mahasiswa sebagai pemilih muda di Provinsi Lampung. Pendekatan ini juga digunakan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai capaian program publik yang dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Capaian program dianalisis menggunakan lima dimensi teori Evaluasi Kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuannya. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih muda diukur berdasarkan teori Partisipasi Politik Milbrath & Goel (1977), yang menyoroti tiga dimensi utama, yaitu kesadaran politik, keterlibatan politik, dan partisipasi aktif. Dengan demikian, penggunaan pendekatan kuantitatif korelasional dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menguji secara statistik hubungan antara capaian pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus* dan tingkat partisipasi mahasiswa, guna memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi program terhadap peningkatan kesadaran dan perilaku politik generasi muda di Provinsi Lampung.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung, dengan fokus pada lokasi pelaksanaan kegiatan Program KPU *Goes to Campus* yang menjadi objek penelitian utama. Lokasi penelitian ditetapkan pada tiga fokus yang telah menjadi mitra aktif KPU Provinsi Lampung dalam kegiatan pendidikan pemilih, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena mewakili karakteristik mahasiswa dari latar belakang keilmuan dan sosial yang beragam, sekaligus menjadi

representasi pemilih muda di wilayah perkotaan Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung merupakan salah satu fakultas yang aktif menjadi mitra dalam pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus*. Berdasarkan data Laporan Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Lampung Tahun 2024, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di lingkungan FMIPA Unila diikuti oleh sekitar 75 mahasiswa, yang sebagian besar termasuk dalam kategori pemilih muda berusia 17–23 tahun. Fakultas ini dipilih karena memiliki karakteristik mahasiswa yang rasional dan terbiasa dengan pendekatan ilmiah, sehingga relevan untuk menilai efektivitas pesan-pesan edukatif dalam program KPU.
2. Fakultas Hukum Universitas Lampung menjadi lokasi kedua pelaksanaan program dengan jumlah peserta sekitar 50 mahasiswa, sebagaimana tercatat dalam laporan kegiatan sosialisasi KPU Provinsi Lampung tahun 2024. Fakultas ini dipilih karena mahasiswa hukum memiliki tingkat kepedulian yang relatif tinggi terhadap isu-isu hukum, politik, dan kepemiluan. Dengan demikian, responden dari fakultas ini diharapkan mampu memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam aspek peningkatan literasi politik dan kepercayaan terhadap KPU.
3. Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung menjadi lokasi ketiga dengan jumlah peserta sebanyak 30 mahasiswa, sesuai dengan data pelaporan kegiatan sosialisasi KPU pada tahun 2024. UTB dipilih untuk memberikan variasi lokasi penelitian antara kampus negeri dan swasta. Mahasiswa UTB mewakili kelompok pemilih muda dari latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam, sehingga dapat memperkaya hasil

analisis efektivitas program dari sisi penerimaan pesan politik dan motivasi partisipatif.

Secara geografis, ketiga lokasi tersebut mewakili pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus* di kawasan perkotaan Provinsi Lampung, dengan cakupan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang sosial. Berdasarkan data KPU Provinsi Lampung (2024), jumlah mahasiswa yang menjadi peserta program di seluruh wilayah Lampung mencapai lebih dari 1.200 orang, dengan konsentrasi tertinggi di Universitas Lampung dan Universitas Tulang Bawang, namun untuk pelaksanaan program KPU *Goes to Campus* cakupan pemilu di angka 155 mahasiswa. Oleh karena itu, ketiga lokasi tersebut dipandang representatif untuk menilai tingkat pengaruh capaian dari Program KPU *Goes to Campus* terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda di Provinsi Lampung.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025-2026 dengan gambaran umum sebagai berikut :

Tabel 4. Waktu Penelitian

Kegiatan	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
Pembuatan Proposal						
Seminar Proposal						
Revisi Proposal						
Pengumpulan Data Lapangan						
Analisis dan Olah Data						
Bimbingan Pasca Lapangan						
Seminar Hasil Penelitian						
Revisi Hasil Penelitian						
Sidang Penelitian						

Sumber : Diolah oleh peneliti, (2025)

3.3 Alat dan Objek Penelitian

3.3.1 Alat Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner terstruktur. Setiap butir pertanyaan dalam kuesioner dikembangkan berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert 4 poin (1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju, 4 = Sangat Setuju).

3.3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah capaian Program KPU *Goes to Campus*, sedangkan variabel dependennya adalah Partisipasi Pemilih Muda. Kedua variabel tersebut dikaji untuk melihat hubungan pengaruh yang terjadi antara capaian pelaksanaan kebijakan publik berupa program sosialisasi politik oleh KPU dan tingkat partisipasi mahasiswa sebagai bagian dari kelompok pemilih muda di Provinsi Lampung.

Secara konseptual, Program KPU *Goes to Campus* merupakan bentuk implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan politik di kalangan mahasiswa melalui kegiatan edukatif seperti seminar, kuliah umum, serta simulasi pemungutan suara. Dalam konteks penelitian ini, capaian program dianalisis menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Dunn (2018), yang menilai sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuannya berdasarkan lima kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Melalui pendekatan ini, capaian program diukur tidak hanya dari hasil kegiatan, tetapi juga dari proses pelaksanaan dan daya tanggap KPU terhadap kebutuhan

mahasiswa sebagai peserta program.

Sementara itu, Partisipasi Pemilih Muda dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan politik, baik berupa kesadaran terhadap isu-isu publik, minat dalam kegiatan politik kampus, maupun perilaku memilih dalam pemilu. Berdasarkan teori Partisipasi Politik Milbrath & Goel (1977), partisipasi muncul sebagai hasil interaksi antara faktor personal, sosial, dan stimulus politik yang diterima individu. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi mahasiswa diukur melalui tiga dimensi, yaitu kesadaran politik, keterlibatan politik, dan partisipasi aktif, yang dipengaruhi oleh stimulus edukatif melalui pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus*.

Kedua objek penelitian ini saling berkaitan dalam kerangka evaluasi kebijakan publik. Program KPU *Goes to Campus* diposisikan sebagai kebijakan publik yang berfungsi sebagai instrumen evaluatif dan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran politik generasi muda, sedangkan partisipasi mahasiswa menjadi indikator capaian pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk menganalisis seberapa besar pengaruh capaian pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus* terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda di Provinsi Lampung, sebagai salah satu tolok ukur capaian pelaksanaan kebijakan publik dalam memperkuat demokrasi dan pendidikan politik di tingkat lokal.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang menjadi peserta Program KPU *Goes to Campus* di Provinsi Lampung pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Laporan Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Lampung Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi di Kota Bandar Lampung dengan jumlah peserta yang

berbeda di setiap kampus. Populasi penelitian ini mencakup mahasiswa dari tiga lokasi utama pelaksanaan kegiatan, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Universitas Tulang Bawang (UTB).

Tabel 5. Distribusi Populasi

No	Nama Perguruan Tinggi	Lokasi Kegiatan Program KPU Goes to Campus	Jumlah Peserta (Mahasiswa)
1	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung	Sosialisasi dan <i>Stadium General</i> Pendidikan Pemilih	75
2	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Seminar Nasional “Pemilih Muda dan Demokrasi Elektoral”	50
3	Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung	Kelas Demokrasi dan Simulasi Pemilu Kampus	30
Total			155

Sumber : Diolah oleh peneliti, (2025)

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif harus dilakukan secara representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan metode *stratified random sampling*.

Stratified random sampling dipilih karena populasi penelitian memiliki karakteristik yang heterogen dan terbagi ke dalam beberapa kelompok (strata) berdasarkan lokasi pelaksanaan Program KPU Goes to Campus. Pembagian strata dilakukan agar setiap kelompok populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk terwakili secara proporsional dalam sampel, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan kondisi

populasi secara keseluruhan.

Populasi penelitian berjumlah 155 mahasiswa peserta Program KPU *Goes to Campus* di Provinsi Lampung yang tersebar pada tiga perguruan tinggi, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (sampling error) sebesar 5% ($e = 0,05$), sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 112 responden.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

e^2 = Tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) sebesar 5%

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel yang diperlukan (n) pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2} = \frac{155}{(1 + 155(0,05)^2)} = \frac{155}{1 + 0,3875} = \frac{155}{1,3875} = 111,7$$

Setelah jumlah sampel ditentukan, pembagian sampel pada setiap strata dilakukan secara proporsional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n_i = (N_i / N) \times n$$

Keterangan:

- n_i = jumlah sampel pada setiap strata
- N_i = jumlah populasi pada setiap strata
- N = jumlah populasi keseluruhan
- n = jumlah sampel keseluruhan

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh distribusi sampel sebagai berikut:

Tabel 6. Distribusi Sampel

No	Strata/ Perguruan Tinggi	(N_i) (Populasi)	Perhitungan ($n_i = (N_i/N) \times n$)	Jumlah Sampel ((n_i))
1	FMIPA Universitas Lampung	75	$(75 / 155) \times 112 =$ $54,19 = 54$	54
2	Fakultas Hukum Universitas Lampung	50	$(50 / 155) \times 112 =$ $36,13 = 36$	36
3	Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung	30	$(30 / 155) \times 112 =$ $21,68 = 22$	22
Total		155		112

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pengambilan sampel pada masing-masing strata dilakukan secara acak (*random*) berdasarkan daftar peserta Program KPU *Goes to Campus* di setiap perguruan tinggi, sehingga setiap anggota populasi dalam strata memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini dinilai telah memenuhi prinsip representativitas dan sesuai dengan kaidah *probability sampling*.

Adapun kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan Program KPU *Goes to Campus* tahun 2024.
2. Mahasiswa aktif yang berasal dari FMIPA Universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung.
3. Mahasiswa yang termasuk dalam kategori pemilih muda berusia 17–24 tahun.

Dengan menggunakan teknik *stratified random sampling*, diharapkan sampel penelitian ini mampu mewakili karakteristik populasi secara proporsional serta memberikan hasil analisis yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), variabel penelitian merupakan atribut atau karakteristik dari suatu objek, individu, maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu, yang ditetapkan peneliti untuk diteliti serta ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) :

- a. Variabel *independent* (variabel bebas) ialah variabel yang berperan memberi pengaruh kepada variabel lain. Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah Capaian Program KPU *Goes to Campus* (X).

- b. Variabel *dependen* (variabel terikat) merupakan variabel yang berperan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah Partisipasi Pemilih Muda (Y).

3.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk memberikan batasan teoritis terhadap variabel penelitian agar memiliki kejelasan makna dan arah pengukuran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel independen (X) Capaian Program KPU *Goes to Campus*, dan variabel dependen (Y) Partisipasi Pemilih Muda. Kedua variabel tersebut dijelaskan berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan Dunn (2018), serta teori Partisipasi Politik Milbrath & Goel (1977).

Secara konseptual, Capaian Program KPU *Goes to Campus* didefinisikan sebagai sejauh mana kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik di perguruan tinggi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan mahasiswa sebagai pemilih muda. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan dilakukan dengan menilai lima kriteria utama: efektivitas (pencapaian tujuan program), efisiensi (penggunaan sumber daya secara optimal), kecukupan (kemampuan program menjawab masalah), pemerataan (distribusi manfaat secara adil), dan responsivitas (daya tanggap terhadap kebutuhan sasaran kebijakan). Program yang efektif ditandai dengan pelaksanaan yang sesuai tujuan, penggunaan sumber daya secara proporsional, pemerataan manfaat di berbagai kampus, serta responsivitas terhadap aspirasi mahasiswa.

Sedangkan secara konseptual, Partisipasi Pemilih Muda adalah tingkat keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas politik, baik dalam bentuk kesadaran politik, minat terhadap isu-isu publik, maupun perilaku konkret dalam menggunakan hak pilih pada pemilu. Berdasarkan teori Partisipasi Politik Milbrath & Goel (1977), partisipasi politik mencerminkan keterlibatan sukarela individu untuk memengaruhi proses politik melalui kegiatan seperti memberikan suara, berdiskusi politik, menghadiri kampanye, atau ikut dalam organisasi politik. Pada konteks penelitian ini, mahasiswa sebagai pemilih muda dipandang sebagai kelompok strategis yang berperan dalam memperkuat demokrasi melalui peningkatan kesadaran, keterlibatan, dan perilaku politik aktif. Dengan demikian, hubungan antara kedua variabel ini berlandaskan pada teori bahwa semakin berhasil pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus* diukur melalui lima dimensi evaluasi kebijakan Dunn (2018), maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran, keterlibatan, dan perilaku politik mahasiswa sebagai pemilih muda di Provinsi Lampung.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan cara pengukuran setiap variabel penelitian secara jelas, sistematis, dan terukur. Dalam penelitian ini, masing-masing variabel diuraikan ke dalam dimensi dan indikator yang dapat diamati serta diukur secara kuantitatif. Indikator-indikator tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang disusun dalam instrumen kuesioner.

Pengukuran setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala Likert empat tingkat, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Skala Likert empat tingkat dipilih untuk menghindari jawaban netral sehingga responden didorong untuk memberikan sikap yang lebih tegas. Adapun

kategori penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 1 = Sangat Tidak Setuju
- b. 2 = Tidak Setuju
- c. 3 = Setuju
- d. 4 = Sangat Setuju

Tabel 7. Operasionalisasi Variabel

N o	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator (Butir Pernyataan Kuesioner)	Skala	Sumber Teori
1	Capaian Program KPU Goes to Campus (X)	Efektivitas	Pencapaian tujuan program	a. Kegiatan KPU Goes to Campus sesuai dengan tujuan peningkatan literasi politik. b. Program mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya pemilu.	Likert 1–4	Dunn (2018)
		Efisiensi	Pemanfaatan sumber daya program	a. Kegiatan dilaksanakan dengan penggunaan waktu dan biaya yang efisien. b. Kegiatan terlaksana dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai.	Likert 1–4	Dunn (2018)
		Kecukupan (Adequacy)	Kemampuan program menjawab masalah	a. Program KPU Goes to Campus mampu menjangkau kebutuhan	Likert 1–4	Dunn (2018)

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator (Butir Pernyataan Kuesioner)	Skala	Sumber Teori
				mahasiswa terkait pendidikan politik. b. Materi sosialisasi sesuai dengan isu dan tantangan pemilih muda.		
		Pemerataan (<i>Equity</i>)	Distribusi manfaat program	a. Kegiatan dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi secara merata. b. Mahasiswa dari berbagai jurusan/kampus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.	Likert 1–4	Dunn (2018)
		Responsivitas (<i>Responsiveness</i>)	Daya tanggap pelaksanaan terhadap kebutuhan sasaran	a. KPU tanggap terhadap masukan dan kebutuhan mahasiswa selama kegiatan berlangsung. b. Pelaksanaan program menyesuaikan aspirasi peserta di setiap kampus.	Likert 1–4	Dunn (2018)
2	Partisipasi Pemilih Muda (Y)	Kesadaran Politik	Pemahaman dan sikap politik	a. Mahasiswa memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. b. Mahasiswa menyadari hak dan tanggung jawab politik.	Likert 1–4	Milbrath & Goel (1977)

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator (Butir Pernyataan Kuesioner)		Sumber Teori
		Keterlibatan Politik	Aktivitas Politik nonformal	a. Mahasiswa mengikuti kegiatan politik seperti seminar, diskusi publik, atau kampanye kampus. b. Mahasiswa turut menyebarkan informasi mengenai pentingnya pemilu.	Likert 1-4	Milbrath & Goel (1977)
		Partisipasi Aktif	Perilaku memilih	a. Mahasiswa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebelumnya. b. Mahasiswa memahami prosedur dan tata cara pemungutan suara.	Likert 1-4	Milbrath & Goel (1977)
		Kepercayaan terhadap KPU	Persepsi terhadap lembaga publik	a. Mahasiswa menilai KPU bekerja secara jujur dan independen. b. Mahasiswa percaya bahwa pemilu diselenggarakan secara adil dan transparan.	Likert 1-4	Milbrath & Goel (1977)

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

3.7 Sumber Data

3.7.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian tanpa perantara (Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh secara langsung dari responden menggunakan instrumen kuesioner dengan skala likert (1–4) yang disebarkan kepada seluruh peserta Program KPU *Goes to Campus*.

3.7.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari responden, melainkan bersumber dari informasi yang telah tersedia sebelumnya (Sugiyono, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari:

1. Laporan resmi KPU Provinsi Lampung terkait pelaksanaan program KPU
Goes to Campus
2. Data partisipasi pemilih muda pada Pemilu sebelumnya (2019 d 2024)
3. Dokumen normatif, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018.
4. Literatur akademik berupa buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta skripsi yang relevan dengan tema capaian program dan partisipasi pemilih muda.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data menggunakan Kuesioner dengan skala likert. Menurut Sugiyono (2021), skala pengukuran adalah suatu kesepakatan yang dijadikan acuan untuk menentukan panjang-pendeknya interval dalam sebuah alat ukur, sehingga ketika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Jenis skala pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, serta persepsi individu maupun kelompok terhadap fenomena sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017), skala likert dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, maupun persepsi seseorang atau kelompok mengenai suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, kuesioner disusun menggunakan skala 1–4.

Adapun makna dari setiap tingkatan skala tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Pengukuran Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Nilai
1	Sangat Setuju	4
2	Setuju	3
3	Tidak Setuju	2
4	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Cahyani dkk. (2020)

3.9 Metode Pengujian Data

3.9.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017), uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, jika instrumen kurang valid maka mempunyai validitas yang rendah. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kuesioner akan dianggap valid ketika pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui kuesioner tersebut. Uji validitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel x dan y

N = Jumlah subjek

$\sum xy$ = Jumlah dari hasil kali nilai X dan Y

$\sum X$ = Jumlah nilai X

$\sum Y$ = Jumlah nilai Y

$\sum X^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai X

3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya atau diandalkan, dengan mengukur konsistensi internalnya. Penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk menguji reliabilitas. Instrumen kuesioner dianggap reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: nilai $\alpha > 0,70$ menunjukkan reliabilitas tinggi, nilai $0,60 < \alpha < 0,70$ menunjukkan reliabilitas sedang, dan nilai $\alpha < 0,60$ menunjukkan reliabilitas rendah. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung Cronbach's Alpha:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_p^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = Koefisien reliabilitas instrumen

K = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma^2 b$ = Jumlah varian butir

$\sigma^2 t$ = Varian total antara 0.08 sampai dengan 0,1

Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ (Ghozali, 2011). Berikut kriteria dalam rumus *Cronbach's Alpha* yang lebih spesifik.

1. Jika nilai *Alpha Cronbach* $0,00 - 0,20$, maka tidak reliabel
2. Jika nilai *Alpha Cronbach* $0,21 - 0,40$, maka kurang reliabel

3. Jika nilai *Alpha Cronbach* 0,41 – 0,60, maka cukup reliabel
4. Jika nilai *Alpha Cronbach* 0,61 – 0,80, maka reliabel
5. Jika nilai *Alpha Cronbach* 0,81 – 1,00, maka sangat reliabel

3.10 Teknik Analisis Data

3.10.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, dan konsisten. Data akan diolah dengan menggunakan beberapa uji, yaitu sebagai berikut:

3.10.1.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak (Haniah, 2014). Uji normalitas yang akan digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai sig, $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi secara normal.
2. Jika nilai sig, $< 0,05$ maka nilai residual tidak terdistribusi secara normal.

3.10.1.2 Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel *independen* dan *dependen* berbentuk linear. Menurut Ghozali (2018), hubungan dikatakan linear apabila signifikansi *deviation from linearity* $> 0,05$.

3.10.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain memiliki varians residual yang bersifat konstan (homoskedastisitas). Uji ini penting dilakukan karena apabila terdapat heteroskedastisitas, maka hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan dapat menimbulkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen secara signifikan memengaruhi nilai absolut residual, maka dalam model tersebut terdapat gejala heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai Sig. < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.11 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Menurut Sugiyono (2019), regresi linear sederhana merupakan metode analisis yang digunakan untuk meramalkan hubungan antara satu variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y). Regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh capaian Program KPU *Goes to Campus* (X) terhadap Partisipasi Pemilih Muda (Y).

Adapun bentuk umum persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Partisipasi Pemilih Muda)

X = Variabel independen (Capaian Program KPU *Goes to Campus*)

α = Konstanta (nilai Y ketika X = 0)

β = Koefisien regresi (besarnya perubahan Y akibat perubahan X satu satuan) e = Error (tingkat kesalahan pengganggu)

3.11.1 Uji Hipotesis

3.11.2 Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Widjarjono, 2010). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel capaian Program KPU *Goes to Campus* (X) terhadap Partisipasi Pemilih Muda (Y).

Menurut Sugiyono (2017), uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Uji pengaruh parsial

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya data

Berikut merupakan kriteria yang digunakan dengan tingkat signifikansi 5%.

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima
4. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak

3.11.3 Uji F (Simutan)

Menurut Sugiyono (2019), uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji apakah variabel capaian Program KPU *Goes to Campus* (X) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Partisipasi Pemilih Muda (Y) di Provinsi Lampung.

Hasil uji F diperoleh dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Rumus uji F menurut Ghozali (2018), adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

- R^2 = Koefisien determinasi
- k = Jumlah variabel independen
- n = Jumlah sampel

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig. > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.11.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila koefisien determinasi (R^2) bernilai tinggi (mendekati satu), maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang besar dalam menerangkan variabel dependen. Sebaliknya, apabila koefisien determinasi (R^2) bernilai rendah (mendekati nol), hal tersebut menunjukkan keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk mengetahui sejauh mana nilai R atau tingkat korelasi antara variabel independen dan variabel dependen, dapat digunakan kriteria koefisien korelasi sebagai berikut

.Tabel 9. Kriteria Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1.	0,000-0,199	Sangat Rendah
2.	0,200-0,399	Rendah
3.	0,400-0,599	Sedang
4.	0,600-0,799	Kuat
5.	0,800-1000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono 2019

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, uji statistik, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Capaian Program KPU *Goes to Campus* terhadap Partisipasi Pemilih Muda di Provinsi Lampung, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Program KPU *Goes to Campus* berpengaruh positif terhadap partisipasi pemilih muda. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1.053 dengan nilai signifikansi (Sig.) = 0.000 < 0.05, yang berarti semakin efektif pelaksanaan program, semakin tinggi tingkat partisipasi mahasiswa. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0.201$) juga menunjukkan bahwa Capaian program memberikan kontribusi sebesar 20,1% terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.
2. Capaian program sebagai kebijakan publik terbukti memberikan pengaruh positif, meskipun kontribusinya masih terbatas. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,201 atau 20,1%, Program KPU *Goes to Campus* memiliki kemampuan menjelaskan peningkatan partisipasi pemilih muda sebesar 20,1%, sedangkan sisanya 79,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut belum menjadi faktor dominan, namun tetap memiliki pengaruh dan arah hubungan positif terhadap peningkatan kesadaran serta kemauan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemilu.

3. Program KPU *Goes to Campus* menunjukkan karakteristik sebagai kebijakan publik yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam jangkauan dan intensitas pelaksanaan. Program ini telah mampu menyesuaikan pendekatan komunikasinya dengan karakteristik mahasiswa melalui media edukatif, diskusi terbuka, serta simulasi pemungutan suara, sehingga meningkatkan pemahaman dan partisipasi secara bertahap. Hasil ini sejalan dengan data CSIS (2024), yang mencatat bahwa 69% pemilih muda memperoleh informasi politik dari media sosial, sehingga capaian program akan meningkat apabila strategi sosialisasi KPU diintegrasikan dengan media digital yang lebih masif. Dengan demikian, KPU *Goes to Campus* dapat dinilai cukup efektif dan relevan, namun ke depan perlu memperluas sinergi antara kegiatan tatap muka di kampus dan edukasi politik berbasis media sosial agar dampaknya terhadap partisipasi pemilih muda semakin besar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Program KPU *Goes to Campus* memiliki pengaruh positif dan relevan secara teoretis terhadap peningkatan partisipasi mahasiswa di Provinsi Lampung. Program ini berkontribusi dalam membangun kesadaran politik, sikap demokratis, dan perilaku partisipatif generasi muda sebagai pemilih rasional dan bertanggung jawab.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk KPU Provinsi Lampung sebagai penyelenggara program: Berdasarkan hasil penelitian, beberapa indikator pada dimensi efektivitas dan efisiensi memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi namun belum maksimal, sehingga masih terdapat

ruang peningkatan dalam pelaksanaan Program KPU *Goes to Campus*. KPU perlu memperkuat kualitas penyampaian materi sosialisasi agar lebih menarik bagi mahasiswa, misalnya melalui penyajian konten visual kreatif, video pendek, hingga penyampaian berbasis diskusi yang lebih interaktif. Selain itu, optimalisasi penggunaan waktu serta koordinasi dengan pihak kampus penting ditingkatkan agar kegiatan berjalan lebih efisien. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa merasa materi terlalu padat dalam durasi yang terbatas, sehingga model penyampaian lebih dinamis dan terstruktur akan menjadikan program semakin efektif dalam meningkatkan pemahaman dan minat politik mahasiswa.

2. Saran untuk peningkatan pemerataan dan aksesibilitas kegiatan program: Nilai mean pada indikator pemerataan menunjukkan kategori cukup tinggi, artinya pelaksanaan sosialisasi sudah menjangkau beberapa kampus tetapi belum merata ke seluruh fakultas dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, program disarankan diperluas tidak hanya di fakultas atau kampus utama, tetapi juga menyasar lebih banyak unit kampus agar manfaat pendidikan politik dapat diterima oleh mahasiswa secara lebih luas. Berdasarkan temuan lapangan, beberapa responden mengungkapkan bahwa informasi kegiatan tidak selalu tersebar merata, sehingga diperlukan mekanisme publikasi yang lebih masif melalui kanal media sosial, website kampus, hingga kolaborasi dengan organisasi mahasiswa untuk menjangkau kelompok yang belum tersentuh program.
3. Saran terkait responsivitas dan keterlibatan peserta: Meskipun dimensi responsivitas berada pada kategori cukup tinggi, hasil temuan menunjukkan bahwa mahasiswa masih cenderung menjadi penerima informasi pasif dan belum sepenuhnya terlibat aktif dalam diskusi politik setelah kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, Program KPU *Goes to Campus* perlu menyediakan

ruang interaksi dua arah yang lebih luas, seperti forum tanya jawab, simulasi pemilu, mini debat, atau studi kasus kepemiluan agar peserta dapat memahami praktik demokrasi secara langsung. Dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar, mahasiswa tidak hanya memahami materi, tetapi terdorong berkembang dari spectator menjadi gladiator politik, sesuai konsep partisipasi Milbrath & Goel.

4. Saran untuk keberlanjutan program dan tindak lanjut kegiatan di kampus: Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program memberikan pengaruh positif terhadap partisipasi mahasiswa, namun kontribusinya hanya sebesar 20,1%. Artinya masih terdapat faktor lain yang memengaruhi partisipasi pemilih muda di luar program. Oleh sebab itu, diperlukan langkah tindak lanjut agar program tidak hanya berlangsung satu kali kegiatan, melainkan berkelanjutan. KPU dapat bekerja sama dengan kampus membentuk komunitas demokrasi, relawan pemilu muda, atau kelas literasi politik berkala sehingga mahasiswa memperoleh kesempatan pendampingan lanjutan untuk meningkatkan kesadaran politiknya. Dengan adanya keberlanjutan program, pengetahuan yang diterima mahasiswa tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi mampu mendorong tindakan politik nyata dalam pemilu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program *KPU Goes to Campus* memiliki kontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda di kalangan mahasiswa, meskipun pengaruhnya masih terbatas pada peserta yang terlibat langsung sehingga dampaknya belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan populasi pemilih muda di perguruan tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis kampus merupakan sarana pendidikan politik yang relevan, namun memerlukan dukungan kelembagaan, peningkatan strategi pelaksanaan, serta perluasan jangkauan program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata dan berkelanjutan. Saran yang diberikan melalui penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam mengembangkan metode sosialisasi yang lebih interaktif dan inklusif, bagi kampus dalam memperkuat kolaborasi kegiatan politik mahasiswa, serta bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan kesadaran politik secara mandiri. Dengan sinergi seluruh pihak, Program KPU *Goes to Campus* berpotensi tidak hanya meningkatkan literasi demokrasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya generasi pemilih muda yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Setiawan, H. (2021). Partisipasi politik pemilih muda dalam Pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.31227/osf.io/n5g6t>
- Akmal, D., Prasetyo, R., & Lestari, W. (2024). Kampanye #TemanPemilih dan gaya komunikasi digital generasi Z. *Jurnal Komunikasi Sosial Politik*, 10(1), 45–60. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2711>
- Alifa, R., Nuraini, D., & Putra, F. (2024). Konten kreatif interaktif dalam meningkatkan literasi politik pemilih muda. *Jurnal Demokrasi dan Komunikasi Politik*, 9(2), 75–89. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/139>
- Amrullah, F., Dwivayani, K. D., & Nurliah, N. (2025). Literasi politik Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Samarinda. *Jurnal Komunikasi Profetik*, 8(1). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/8574>
- Anderson, J. E. (2014). *Public policy making: An introduction* (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). *Provinsi Lampung dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Statistik kependudukan Provinsi Lampung tahun 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Budifebrianto, D., & Delliana, R. (2020). Efektivitas komunikasi politik digital terhadap partisipasi pemilih muda. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 7(3), 112–124.
- CNN Indonesia. (2023, December 15). *Pemilih milenial jadi fokus sosialisasi KPU di Pemilu 2024*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional>

- Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (2024). Tren perilaku politik generasi muda Indonesia 2024. CSIS Indonesia.
<https://www.csis.or.id/publications>
- DetikNews. (2023, November 22). Program KPU Goes to Campus dinilai efektif edukasi politik generasi Z.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Fauzan, A. (2022). Apatisme politik pemilih muda dan kepercayaan terhadap institusi politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(2), 56–70.
<https://doi.org/10.32528/jisp.v5i2.300>
- Firmansyah, R. (2020). Literasi politik generasi milenial dalam Pemilu 2019. *Jurnal Sosial Demokrasi*, 8(1), 33–47. <https://doi.org/10.21009/jsd.081.05>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniah. (2014). *Statistika pendidikan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Hidayat, R., Putri, M., & Sembiring, L. (2023). Kolaborasi tokoh lokal dalam pendidikan pemilih oleh KPU. *Jurnal Pemerintahan dan Demokrasi*, 11(2), 90–104. <https://doi.org/10.21009/jpd.112.03>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Indikator Politik Indonesia. (2024). *Survei nasional: Partisipasi politik generasi muda menjelang Pemilu 2024*. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024*. KPU Provinsi Lampung.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. (2024). *Laporan penyelenggaraan program KPU Goes to Campus tahun 2024*. Bandar Lampung: KPU Provinsi Lampung.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Data pemilih tetap Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. (2024). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Laporan nasional partisipasi pemilih Pemilu Serentak 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Kompas.com. (2024, February 20). *KPU dorong partisipasi pemilih muda melalui program Goes to Campus*.
- Kusuma, A. (2021). *Efektivitas program KPU Goes to School terhadap partisipasi pemilih pemula di Kota Malang* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. Universitas Brawijaya Repository. <http://repository.ub.ac.id>
- Lampung Post. (2024, January 10). *KPU Lampung ajak mahasiswa aktif dalam demokrasi kampus*. <https://lampost.co>
- Lestari, D. (2020). *Evaluasi kebijakan pendidikan politik dalam peningkatan partisipasi pemilih muda di Kota Palembang* [Tesis, Universitas Sriwijaya]. Universitas Sriwijaya Repository. <https://repository.unsri.ac.id>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics?* Rand McNally.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratama, A. (2019). *Hubungan efektivitas sosialisasi Pemilu terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa di Lampung* [Skripsi, Universitas Lampung]. <http://repository.lppm.unila.ac.id>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- Rahman, N., & Indriastuti, S. (2022). Peran KPU dalam meningkatkan literasi politik generasi milenial melalui program KPU Goes to Campus di Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Publik dan Politik*, 6(1), 12–27. <https://doi.org/10.24036/jkpp.v6i1.394>
- Rahmawati, E., & Nasution, F. (2022). Efektivitas forum diskusi publik dalam pendidikan politik pemilih muda. *Jurnal Komunikasi Politik dan Pemerintahan*, 9(2), 44–58. <https://doi.org/10.21009/jkpp.092.05>
- RMOL. (2024, April 6). *Partisipasi pemilih di Demak lampau target nasional*. <https://rmol.id/nusantara/read/2024/04/06/615949/partisipasi-pemilih-di-demak-lampaui-target-nasional>

- Sari, A. P. (2020). Evaluasi program sosialisasi Pemilu oleh KPU Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.22236/jipkp.v5i1.478>
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1980). *Efficiency and effectiveness in organizations*. New York : McGraw-Hill.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Syaifuddin, A. (2021). Pendidikan politik bagi generasi muda melalui KPU Goes to Campus. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 7(2), 88–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/rvx5c>
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Umma, L., & Ahmad, F. (2025). Media sosial sebagai sarana transparansi informasi publik Pemilu. *Jurnal e-Government dan Demokrasi Digital*, 10(1), 55–72. <https://doi.org/10.14421/jegd.2025.101.04>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. Harper & Row.